

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang berpenduduk lebih kurang 200 juta jiwa, bila dilihat penduduknya terdiri dari suku asli seperti Jawa, Minangkabau, Batak, Aceh, Ambon dan berbagai etnis lainnya. Disamping suku pribumi tersebut, di Indonesia juga terdapat berbagai suku bangsa asing seperti Arab, India, Tionghoa dan lain sebagainya. Dari berbagai etnis nonpribumi yang ada tersebut, etnis Cina merupakan etnis yang cukup menonjol dan sering mendapat perhatian dari masyarakat dan Pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan keterlibatan mereka dalam berbagai sektor kehidupan, terutama di bidang perekonomian. Keterlibatan mereka ini telah menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat pribumi, yang bisa menjurus kepada terciptanya konflik antara etnis Tionghoa dan pribumi. Hal ini dapat dilihat dengan timbulnya gejolak-gejolak dalam masyarakat sebagai kegiatan anti Tionghoa, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Pada masa Orde Lama sejumlah orang-orang Tionghoa dianggap sebagai simpatisan PKI karena pola orientasi Orde Lama berorientasi ke RRC. Puncak dari ketegangan itu diputuskannya hubungan diplomatik Indonesia dengan RRC. Pada masa Orde Baru kegiatan-kegiatan anti Cina masih merebak dengan alasan terlalu banyaknya mereka menguasai perekonomian bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat di Medan, dari hasil sensus 1983 orang Cina Medan telah berjumlah 166.166 orang lebih atau sekitar 12,84% dari jumlah penduduk yang ada. Dari sekian jumlah mereka telah menguasai sejumlah

industri, persurat kabaran, bergerak di bidang ekspor, import, menjadi pemilik perkebunan, pertanian, pasar swalayan, grosir dan lain sebagainya. Kenyataan ini tidak saja terjadi di Medan, tetapi juga di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Begitu juga di Kotamadya Padang dengan jumlah penduduknya \pm 723.321 jiwa menurut sensus 1996, sekitar 32.906 orang dihuni oleh etnis Cina yang bermukim di 9 kelurahan (Sumber Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Padang).

Secara umum dari pengamatan dapat dinyatakan bahwa mata pencaharian golongan etnis Cina yang tinggal di Padang adalah sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan industri. Perdagangan yang mereka pegang adalah pada sektor grosir, sebagian dari mereka juga bergerak dalam bidang eceran. Komoditi yang mereka jual adalah barang-barang elektronik, P & D, automotif, rumah makan, percetakan, bioskop, dan lain-lain. Jadi dapat dikatakan sekitar 80 % kegiatan bisnis di Indonesia dikendalikan oleh etnis Cina (**M.Rajab Lubis:1985:10**). Menurut asumsi masyarakat posisi tersebut dapat mereka kuasai karena pandai mempengaruhi penguasa dan penduduk pribumi, agar para penguasa bersedia membantu usahanya itu. Anggapan ini lama-lama meningkatkan kesadaran dan sentimen dari pribumi sehingga terjadinya peristiwa-peristiwa pembakaran toko-toko serta modal atau kekayaan Cina. Kejadian ini terjadi juga tanggal 5 Agustus 1973 di Bandung, November 1980 di Solo-Semarang, peristiwa Tanjung priok 1984, 26 Desember 1996 di Tasikmalaya, Februari 1997 di Karawang (Forum Keadilan : Nomor 21 Tahun V, 27 Januari 1997).

Mengingat akibat yang mungkin timbul dari konflik antara etnis Cina dengan pribumi ini dikemudian hari maka sejak tahun 1932 Pemerintah Indonesia menganjurkan agar etnis Cina untuk berasimilasi agar tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi masyarakat keturunan Cina pembauran dalam hal ini adalah masuk dan diterimanya

seorang yang berasal dari keturunan Tionghoa kedalam tubuh bangsa Indonesia tanpa harus memandang dari mana asal mereka (Yunus Jahya:1983:18). Dengan demikian diharapkan etnis Cina dapat lebur kedalam kehidupan bangsa Indonesia dan merasa diri mereka menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Selama ini ada dua faktor penting penyebab kurangnya asimilasi/pembauran di kalangan orang Tionghoa di Indonesia yaitu :

1. adanya kebijaksanaan Pemerintah Kolonial Belanda dahulu yang menggolongkan orang Tionghoa dalam kedudukan hukum dan sosial yang berbeda dengan pribumi Indonesia.
2. perasaan orang Tionghoa yang sangat mengagungkan kultur nenek moyang. Perasaan ini mengarahkan mereka pada sikap untuk selalu berorientasi pada budaya leluhur.

(Jhon K. Naveront, 1994:45).

Sementara dari pihak pribumi sendiri ada beberapa faktor penyebab sulitnya tercipta pembauran yaitu :

1. Dalam bidang politik, etnis Cina yang berada di Indonesia dicurigai sebagai kaki tangan pemerintah RRC. Hal ini terlihat dari adanya intervensi langsung dari RRC, seperti dalam pemberontakan G30S/PKI 1966. Luka lama ini sangat sulit dilupakan oleh masyarakat Indonesia.
2. Kemudian di bidang ekonomi mereka banyak yang berhasil dan memegang beberapa sektor yang cukup penting seperti pabrik-pabrik dan perdagangan. Dengan demikian mereka mendominasi perekonomian Indonesia sampai saat ini. Hal ini menimbulkan prasangka dan kecemburuan sosial dari pihak pribumi.
3. Dalam bidang kehidupan sosial, perilaku yang mereka tampilkan cenderung bersifat eksklusif **(Hidayat, 1970:13)**. Proses pembauran ini merupakan modal efektif karena pluralisme sosial diantara anggota masyarakat dapat diatasi karena adanya interaksi dan sosialisasi yang baik.

Dalam mempercepat proses pembauran tersebut, maka Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan diantaranya : Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 mengenai ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama Cina, Instruksi Presiden tanggal 6 Desember 1967 tentang *agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina*, Keppres No. 240/1967 tanggal 10 April 1967 tentang *kebijaksanaan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing (Jahya dalam Greif 1991:120)*.

Memasuki zaman Orde baru ini usaha pembauran ialah dibentuknya BPKB (Badan Pembinaan Kesatuan Bangsa) di Jakarta tanggal 8 Agustus 1974. BPKB ini bergerak langsung ke dalam masyarakat melalui Dinas Pemerintah dalam mengintegrasikan pribumi dengan nonpribumi di pelbagai lingkungan. Selanjutnya oleh Pemerintah Pusat akhirnya diusahakan pula untuk menggalakkan pembauran kembali dengan TAP MPR/1978 BAB IV. Usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa **(K. Sindhunata, 1984:4)**.

Pada dasarnya keseluruhan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia tersebut bertujuan untuk menanggulangi berbagai krisis yang timbul antara etnis Cina dengan etnis pribumi. Dengan demikian diharapkan kedua golongan masyarakat dapat membuka tabir kehidupan yang bersifat eksklusif dan menghilangkan rasa khawatir serta prasangka yang negatif dari satu golongan terhadap golongan lainnya. Adanya sikap hormat-menghormati atas norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku pada masing-masing, merupakan paduan yang harmonis dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia. Keharmonisan ini adalah usaha mempermudah proses pembauran dalam pembinaan atau "*National Building*" dalam kesatuan bangsa yang abadi.

Masalah integrasi bangsa, atau isu persatuan dan kesatuan nampaknya masih tetap menjadi kebutuhan pada suatu negara yang majemuk. Indonesia misalnya, secara historis, sebelum kemerdekaan, sangat berkepentingan dengan masalah persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya memperkokoh negara kesatuan nampaknya perlu terus dikembangkan. Apalagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi dan transportasi, telah mengantarkan masyarakat dunia dalam pengaruh budaya global : hubungan antar bangsa dan individu dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Dari perspektif ini, kelihatannya masalah integrasi bangsa tetap relevan untuk dipelajari.

Dalam konteks Indonesia, masalah integrasi bangsa ini, oleh sementara orang tidak perlu dipersoalkan lagi, karena dianggap sudah kokoh, namun kenyataannya tidaklah demikian. Sebab diakui atau tidak, konflik sosial dan fisik antar etnik telah terjadi beberapa kali, dan itu telah menimbulkan berbagai kerugian, baik sosial, kultural, ekonomi maupun politik.

Dalam pencapaian persatuan dan kesatuan bangsa itu Pemerintah Daerah Kodya Padang terlihat telah menemukan suatu pola untuk memantapkan proses pembauran dengan baik. Hal ini terbukti tidak pernah terjadinya konflik etnis di Sumatera Barat khususnya Kodya Padang.

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah tampaknya benar-benar memungkinkan terciptanya perwujudan kesatuan serta perilaku hidup secara nyata antara pihak dan golongan dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yaitu pembangunan. Selain dari itu kebijaksanaan Pemerintah dalam kegiatan pembangunan secara terpadu juga mampu memadukan unsur-unsur yang terkait. Program pembangunan itu disebut *Manunggal Sakato*.

Dengan pelaksanaan program Manunggal Sakato, yang dituangkan dalam kegiatan fisik dan nonfisik, terjadi interaksi dan sosialisasi diantara anggota masyarakat yang melaksanakan kegiatan tersebut. Interaksi adalah proses sosial yang melibatkan dua individu dalam tingkah laku yang saling menyesuaikan diri. Ketika interaksi berlangsung, secara bersama terjadi pula proses sosialisasi, yaitu suatu proses penyesuaian budaya suatu kelompok dengan budaya kelompok lain dan peranannya dalam kelompok itu atau seseorang menghayati (mendarah dagingkan-internalize) norma-norma kelompok dimana ia hidup. Sebagai konsekuensi dari hubungan itu timbul rasa kebersamaan, satu (utuh), yang pada akhirnya bermuara kepada proses persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan diatas penulis berkeinginan untuk menelaah kenapa pertentangan antar etnis Cina dan pribumi tidak pernah terjadi di Kotamadya Padang, faktor-faktor apa yang menyebabkan keberhasilan tersebut, serta sejauhmana program Manunggal Sakato dapat berfungsi untuk memantapkan nilai persatuan dan kesatuan. Sehingga bentuk-bentuk pembauran yang telah dilakukan dan telah terbukti berhasil mempersatukan etnis Cina dan pribumi bisa dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Adalah sebuah kenyataan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini terdapat pada suku atau etnik, bahasa, agama, adat istiadat dan sebagainya. Karena itu dapat dimaklumi situasi etnis masih merupakan isu sosial yang berjaln dengan berbagai variabel kependudukan dan psikologi sosial. Keadaan ini merupakan sebuah ungkapan atau simbol yang menunjukkan suatu perasaan agitasi dan penuh emosi.

Dalam kehidupan masyarakat seperti ini, akan ditemui banyak sekali sumber-sumber ketidakselarasan dan ketidakharmonisan yang mengarah kepada permusuhan dan pertentangan antar etnis, yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan, disintegrasi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Masalah tentang etnis yang nampak pada saat sekarang adalah keberadaan yang cukup menonjol dari etnis Cina, karena perilaku yang mereka tampilkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek kehidupan selama ini, terutama dalam bidang sosial-kultural, politik dan ekonomi (**Z.M. Hidayat: 1970:13**). Kenyataan ini tentu harus segera dicari pemecahan masalahnya agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.

Yang menjadi permasalahan disini adalah : Sejauhmanakah peranan pembauran dalam membina nilai persatuan dan kesatuan bangsa? Adapun pertanyaan tersebut dirinci lagi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pembauran yang sudah terjadi di Kodya Padang ?
2. Bagaimanakah peranan masyarakat Kelurahan Simpang Enam dalam proses pembauran ?
3. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat proses pembauran di Kodya Padang.
4. Usaha-usaha apakah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kodya Padang dalam mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan ?
5. Apakah dampak positif program pembauran bagi pembinaan persatuan dan kesatuan di Kodya Padang sebagai wujud karakteristik Pendidikan Umum?

C. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan struktur masyarakat Kelurahan Simpang Enam.
2. Untuk menelaah bentuk-bentuk pembauran yang sudah terealisasi di Kodya Padang khususnya Kelurahan Simpang Enam.
3. Melihat peranan masyarakat Kelurahan Simpang Enam dalam proses pembauran.
4. Untuk menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pembauran di Kodya Padang ditinjau dari kasus di Kelurahan Simpang Enam.
5. Untuk melihat usaha-usaha yang ditempuh Pemerintah Kodya Padang dalam proses pembauran.
6. Menjawab dampak positif program pembauran bagi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai wujud karakteristik Pendidikan Umum.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Memberikan cara-cara untuk merealisasikan program pembauran dalam mem-bina nilai persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Dapat dijadikan suatu model program bagi daerah-daerah lain sebagai upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

E. Defenisi Operasional

Pembauran adalah proses penyatu-paduan segenap unsur masyarakat bangsa Indonesia menjadi satu kebulatan sosiologis yang utuh dalam semua segi kehidupan, sehingga keturunan asing tidak lagi ada sebagai suatu golongan tersendiri, melainkan

lebur luluh ke dalam sistim nilai budaya Indonesia dan tidak lagi menampakkan ciri-ciri khas golongannya semula dalam sikap dan prilakunya.

Proses pembauran menyentuh dan berada dalam semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik perorangan dan keluarga maupun dalam ikatan kelompok, organisasi dan lembaga masyarakat di semua bidang mulai tingkat bawah sampai tingkat teratas.

Program pembauran meliputi semua etnis yang ada di Indonesia baik pribumi maupun nonpribumi. Tetapi yang merupakan kajian penulis dalam tesis ini adalah pembauran antara penduduk asli Minangkabau dengan WNI turunan Cina. Karena isu ini merupakan yang paling rawan dan perlu pembinaan yang terarah dan intensif.

Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan.

Indonesia mengandung dua makna, pertama, makna geografis, yang berarti sebagian bumi yang membentang dari 95 ° -141 ° bujur Timur dan dari 6 ° lintang Utara sampai 11 ° lintang Selatan. Kedua : makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah tersebut. Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya cita-cita persahabatan dan persaudaraan segala bangsa, diliputi oleh suasana kebenaran, keadilan dan kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan. Rasa Persatuan Indonesia dipupuk pula oleh keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan itu bertambah besar oleh karena seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak (Z.S. Nainggolan 1996:87-88).

Jadi Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Nasionalisme Indonesia mengatasi segala paham golongan, suku bangsa sebaliknya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang padu, tidak terpecah-belah oleh sebab apapun.

Dalam buku Manunggal Sakato, Padang Kota Tercinta Tahun 1996 dikatakan bahwa Manunggal Sakato adalah suatu sistim pembangunan Desa/ Kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah, ABRI dan masyarakat dalam rangka mempercepat proses pembangunan Desa/Kelurahan yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Dengan perkataan lain Manunggal Sakato adalah kondisi masyarakat benar-benar memungkinkan terciptanya perwujudan persatuan dan kesatuan serta perilaku hidup secara nyata antara pihak dan golongan dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan.

Manunggal Sakato dilaksanakan pada masing-masing Desa/Kelurahan di Sumatera Barat yang pada mulanya menggunakan dana stimulus Inpres Bantuan Pembangunan Desa saja, kemudian disempurnakan dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 16/Inst/GSB/1985 tertanggal 14 Juni 1985 tentang Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan Program/Proyek Lintas Sektoral Masuk Desa dilaksanakan secara Manunggal Sakato. Pelaksanaan ini juga didukung oleh peran serta masyarakat berupa bantuan tenaga, pikiran, material, fasilitas dan doa.

Manunggal Sakato merupakan pencerminan dari semboyan masyarakat Minangkabau yang berbunyi "*Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang*", dimana peran ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai yang dikenal dengan "*Tungku Tigo Sajarangan*" sangat menentukan dan merupakan keampuhan dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

